

DESAIN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENGHADAPI KRISIS GLOBAL

Telisa Aulia Falianty¹

Abstracts

Global crisis has been spreading out the pessimism to the world. The crisis in US and Europe caused the slowdown in average growth of the world, impacting the slowdown of other countries economic activities. The crisis should be tackle using the right design of public policy. The paper will overview the design of public policy, in monetary policy, fiscal policy, and sectoral policy to deal with the crisis. The method is descriptive analysis combined with some quantitative methodology. The analysis found that Indonesia should take several policy actions either ini fiscal policy, monetary policy, or sectoral policy to handle the crisis and also mitigate the risk.

Keywords: Global Crisis, Public Policy.

Abstrak

Krisis global telah menyebar ke seluruh dunia dan menimbulkan pesimisme di berbagai belahan dunia. Krisis di Amerika Serikat dan Eropa telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia secara rata-rata melambat. Krisis global ini harus ditangani dengan menggunakan kebijakan publik yang tepat. Makalah ini akan membahas desain kebijakan publik untuk menangani krisis baik dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan sektoral. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dilengkapi dengan metodologi kuantitatif di beberapa bagian. Analisis dari kajian menunjukkan bahwa Indonesia harus mengambil serangkaian kebijakan baik di kebijakan fiskal, moneter, maupun sektoral untuk menangani dan memitigasi krisis.

Kata Kunci: Krisis Global, Kebijakan Publik.

¹ Penulis adalah Macroeconomist Ec-Think Indonesia dan Pengajar Fakultas Ekonomi UI (email: telisa97fe@yahoo.com).

Catatan: Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas masukan dari CEO Ec-Think Indonesia dan bantuan data dari para *Research Assistant* Ec-Think Indonesia.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis global yang dimulai tahun 2007 diperkirakan banyak pihak akan segera pulih karena kepercayaan publik dunia bahwa Amerika Serikat sebagai negara adidaya mampu menghadapi masalah krisis ekonomi dengan segera. Namun ternyata ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Krisis Amerika berlanjut dengan krisis di Yunani dan akhirnya menyebar ke negara-negara anggota Uni Eropa lainnya.

Indonesia sebagai negara yang terbuka tentu tak luput dari terkena dampak krisis global ini. Krisis Eropa yang tidak kunjung reda mempengaruhi kinerja ekspor kita. Perlambatan ekspor mulai dirasakan dan terlihat dari data ekspor bulan Agustus-September 2011 yang menunjukkan penurunan. Di awal-awal krisis Eropa pun IHSG sempat terkoreksi dan nilai tukar Rupiah melemah.

Dalam sejarah krisis ekonomi, baru kali ini yang menjadi negara-negara yang memimpin pemulihan bukan dari negara maju melainkan negara-negara *emerging markets* di Asia. Asia diekspektasikan akan terus menjadi *leader* dalam *global recovery* walaupun pada tingkat moderat, dengan China sebagai motornya. Namun Asia tetap memiliki risiko. Risiko penting yang dihadapi Asia adalah ketergantungan terhadap permintaan eksternal.

Saat ini telah terjadi pergeseran kiblat penunjang perekonomian global, dari negara-negara maju (terutama G-7, yaitu Negara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Perancis, Italia, dan Jepang), menuju ke negara-negara berkembang, atau dapat dikatakan telah terjadi *rotation of global growth*. Hal ini ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di negara-negara berkembang sebagai prasyarat dalam menunjang hal tersebut. Tingkat GDP yang dihitung berdasarkan PPP (*Purchasing Power Parity*) diperkirakan oleh BBVA Research (*Banco Bilbao Vizcaya Argentaria*) akan meningkat sebesar (lebih-kurang) USD40 *trillion* pada 10 tahun mendatang, di mana Amerika Serikat akan menyumbang tambahan GDP sebesar USD2,8 *trillion*, seterusnya negara-negara G-6 sebesar (lebih kurang) USD2,4 *trillion* (atau sekitar USD400 *billion* per negara). Menurut *forecasts* BBVA, dengan memasukkan 10 negara yang tergabung dalam *EAGLES* (*Emerging and Growth Leading Economies*), negara-negara tersebut akan memiliki kontribusi 4 kali lebih besar terhadap pertumbuhan global pada 10

tahun ke depan, hal ini ditunjang pula dengan *additional demand* yang lebih tinggi dibanding rata-rata negara G-6 akibat adanya faktor *demographic bonus* serta faktor fundamental makroekonomi yang lebih baik dibanding negara-negara maju. Keadaan di atas dapat digambarkan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia oleh *BBVA Research* (2011) dan *Concensus Forecast* untuk Tahun 2010-2020

| Negara | <i>Average GDP Growth Rates Tahun 2010-2020</i> | <i>Concensus Forecast</i> |
|-----------|---|---------------------------|
| China | 4,6 | 4,6 |
| India | 8,6 | 8,4 |
| Brazil | 6,2 | 6,6 |
| Indonesia | 6,8 | 7,8 |
| Korea | 5,5 | 6,2 |
| Rusia | 4,2 | 4,1 |
| Mexiko | 2,9 | 4,7 |
| Mesir | 2,5 | 4,5 |
| Taiwan | 4,3 | 5,4 |
| Turki | 4 | 4,4 |

Sumber: *BBVA Research* dan *Concensus Forecast*, 2011.

Adanya perubahan *genuine* pertumbuhan ekonomi global dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang, yang terutama diakibatkan terjadinya *slowdown* pertumbuhan ekonomi di negara-negara G-7 dan krisis yang menimpa mereka, telah membuat beberapa ekonom mengidentifikasi negara-negara yang pada nantinya akan menjadi negara-negara penopang ekonomi dunia, yaitu negara-negara yang memiliki prospek pembangunan ekonomi yang lebih baik dimasa datang. Negara ini disebut *BBVA Research* dengan *EAGLES (Emerging and Growth Leading Economies)*. Indonesia diprediksikan akan masuk ke negara *EAGLES* ini.

Untuk merealisasikan potensi seperti yang diprediksikan *BBVA Research* tersebut di tengah terjadinya krisis global, Indonesia perlu terus memperbaiki diri dan melewati badai krisis global ini. Untuk itu diperlukan berbagai kebijakan untuk menghadapi krisis. Paper ini akan mengulas bagaimana seharusnya Indonesia menghadapi krisis global.

B. Sejarah Terjadinya Krisis Global

Salah satu penyebab terjadinya krisis global yang diawali oleh krisis Amerika Serikat berakar dari permasalahan ketidakseimbangan global (*global imbalances*) dan krisis *sub prime mortgage* di Amerika Serikat.

Ketidakseimbangan global adalah terjadinya ketimpangan antar negara. Di satu sisi ada negara yang terlalu banyak mengonsumsi sampai hutang begitu menumpuk, tetapi di sisi lain ada negara yang giat memproduksi dan menabung sampai memiliki surplus yang besar. Hal ini terjadi dalam jangka waktu yang lama sehingga bersifat persisten.

Tabel 2. Neraca Transaksi Berjalan Negara Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan China Periode Tahun 2005-2010

| Periode | USA | | EU | | UK | | China | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | (Billion US\$) | Percent of GDP | (Billion US\$) | Percent of GDP | (Billion US\$) | Percent of GDP | (Billion US\$) | Percent of GDP |
| 2005 | -747.60 | -5.92 | 19.19 | 0.30 | -59.78 | -2.62 | 160.82 | 7.13 |
| 2006 | -802.64 | -5.99 | -0.33 | -0.10 | -82.80 | -3.38 | 253.27 | 9.34 |
| 2007 | -718.10 | -5.11 | 24.85 | 0.40 | -73.03 | -2.60 | 371.83 | 10.64 |
| 2008 | -668.86 | -4.66 | -187.78 | -0.80 | -44.06 | -1.65 | 436.11 | 9.65 |
| 2009 | -378.44 | -2.68 | -64.50 | -0.30 | -24.26 | -1.11 | 297.10 | 5.96 |
| 2010* | -466.51 | -3.19 | -59.58 | 0.30 | -50.31 | -2.23 | 269.87 | 4.70 |

Sumber: *Quarterly Economic Update Ec-Think Indonesia*, Januari 2011.

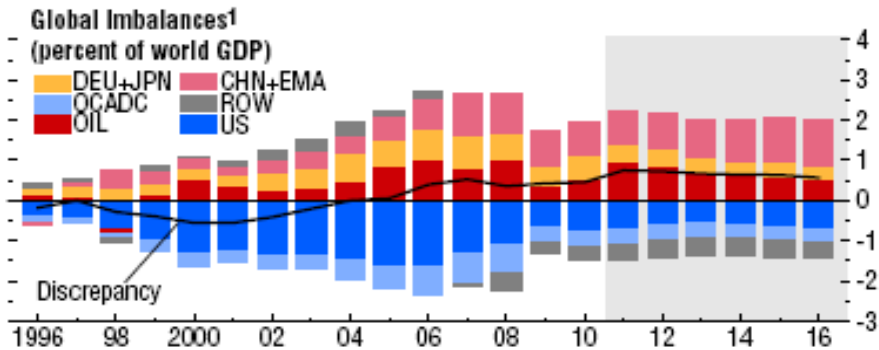
Terlihat dari data tersebut bahwa surplus yang dinikmati oleh China sama dengan defisit yang dialami Amerika dan negara-negara Eropa Barat. Ketidakseimbangan global dalam konteks Amerika Serikat yang memiliki *current account deficit*, yang berarti bahwa konsumsi di AS dibiayai oleh *saving* dari negara-negara di dunia yang mengalami surplus *current account*. Surplus *current account* tersebut dominan dimiliki oleh China saat ini. Persamaan identitas dalam perekonomian terbuka:

$$\begin{aligned}
 S-I &= CAB \\
 S &= \textit{saving} \\
 I &= \textit{investment} \\
 CAB &= \textit{current account balance}
 \end{aligned}$$

Surplus *current account* yang besar di China berarti *saving* di China jauh melebihi investasi di China.

IMF (April 2011) memperkirakan *global imbalances* dalam jangka menengah akan tetap lebar. Ketidakseimbangan global atau *global*

imbalances yang terjadi adalah surplus transaksi berjalan dari negara-negara China-Asia, Jepang, dan penghasil minyak di satu sisi dan di sisi lain terjadi defisit neraca transaksi berjalan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini tampak di Gambar 1.



Gambar 1. Ketidakseimbangan Global (Persentase dari GDP Dunia)

Sumber: *World Economic Outlook* IMF, April 2011.

Menumpuknya dana tabungan yang tersedia di dunia belahan timur (terutama China) telah membuka kesempatan belahan barat membiayai defisit anggaran Pemerintah dan perorangan. Dana tersebut sebagian digunakan dalam penyaluran kredit perumahan di Amerika Serikat sehingga terjadi *credit boom*. Kebijakan suku bunga rendah oleh *Federal Reserve* telah mendorong permintaan kredit menjadi melimpah, masyarakat yang tadinya tidak mampu mencicil, sekarang mendapatkan akses kredit yang relatif lebih murah. Konsumen yang tidak layak secara kredit pun datanya dibuat layak. Persoalan mulai timbul ketika *the Fed* mulai menaikkan suku bunga. Kewajiban yang harus dibayar debitur menjadi membengkak. Debitur mengalami kesulitan untuk mencicil kewajiban yang membengkak tersebut yang pada gilirannya memunculkan kredit bermasalah. Inilah awal terjadinya krisis kredit *sub prime mortgage* di Amerika Serikat.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dari data sekunder serta *literature review*. Untuk khusus penghitungan *exchange market pressure index* (EMPI) digunakan metode pengukuran

kuantitatif. Data-data sekunder yang digunakan bersumber dari IMF, *BBVA Research*, Bank Indonesia, dan Badan Kebijakan Fiskal. Untuk periode penelitian terutama digunakan data sejak terjadi krisis global 2007. Meskipun demikian, sebagai perbandingan dikumpulkan juga data sebelum krisis global (pada umumnya sejak tahun 2000).

II. STUDI LITERATUR TENTANG KETIDAKSEIMBANGAN GLOBAL DAN GLOBAL REBALANCING

Salah satu isu penting yang diangkat oleh IMF adalah *Global Rebalancing*. Menurut IMF, Asia tergantung pada *external demand* sehingga isu *global rebalancing* menjadi penting. Menurut mereka, China sendiri tidak dapat *rebalance* sendirian. Negara Asia lainnya termasuk Indonesia juga perlu melakukan *rebalancing*. Menurut Roubini dan Setser (2004) kita harus melakukan *global adjustment* jika tidak maka krisis finansial mengancam. Edwards (2006) juga berpendapat sama. *Current account deficit* yang besar bisa menimbulkan krisis finansial dan pertumbuhan ekonomi negatif.

Stiglitz (2006) mengatakan bahwa untuk menangani *global imbalances* yang terkait defisit neraca transaksi berjalan Amerika Serikat adalah dengan memotong pengeluaran Pemerintah dan memberlakukan pajak progresif. Tapi itu tidak mungkin dilakukan dalam situasi krisis karena akan memperparah situasi. Kontraksi fiskal yang dilakukan bersamaan saat pengeluaran konsumsi dan investasi menurun dapat menyebabkan permintaan agregat jatuh lebih dalam.

Menurut Blanchard (2007), solusi terhadap ketidakseimbangan global adalah strategi makro dari China yaitu apresiasi *reminbi*, meningkatkan konsumsi dan permintaan internal China, serta meningkatkan asuransi. Solusi kedua menurut Blanchard adalah apresiasi Yen. Selain itu diperlukan peningkatan pengeluaran di negara-negara yang menikmati *windfall* dari kenaikan harga minyak. Solusi lainnya adalah perbaikan fungsi intermediasi di negara-negara berkembang dengan cara peningkatan investasi.

Seberapa besar intensitas dan kecepatan dari transmisi gejala eksternal mempengaruhi perekonomian domestik suatu negara antara lain akan tergantung pada besarnya eksposur suatu negara terhadap *shock* yang terjadi, kekuatan dan kerentanan negara menghadapi *shock* (yang tergantung pada kemajuan faktor institusional dan infrastrukturnya), serta

respon kebijakan domestik terhadap gejolak yang terjadi (Már Gudmundsson, 2009) dalam Kurniati & Permata (2009). Sehingga memperkuat fundamental perekonomian domestik akan menjadi sangat penting.

III. DESAIN KEBIJAKAN EKONOMI

A. Desain Kebijakan Moneter

1. Memperkuat *Macroprudential* dan *Microprudential*

Macroprudential terkait dengan regulasi dan supervisi perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan untuk menghindari instabilitas finansial dan untuk menghindari *systemic risk*. Sedangkan *microprudential* diperlukan untuk kesehatan individu bank.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah melakukan berbagai kebijakan terkait *macroprudential*, yaitu: penetapan batas posisi saldo pinjaman luar negeri jangka pendek maksimum 3 persen dari modal, *six month holding period* untuk pembelian SBI, serta kebijakan lalu lintas devisa hasil ekspor. Aturan *six month holding period* adalah aturan yang berisi bahwa pemegang SBI harus memegang SBI minimal 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut SBI tidak dapat diperjualbelikan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi volatilitas *hot money* yang berasal dari arus modal asing yang masuk ke Indonesia.

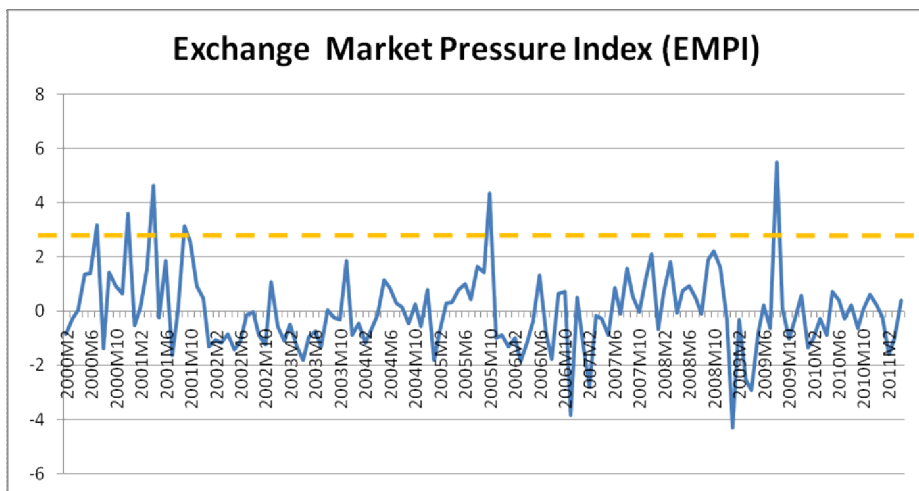
Terkait *microprudential* pun Bank Indonesia telah menerapkan regulasi-regulasi di bidang perbankan untuk mengantisipasi dampak krisis. Kebijakan ini perlu terus diperkuat dan diawasi secara ketat. Kasus-kasus seperti Bank Century, Citibank, dan lain-lain menjadi pendorong bagi otoritas perbankan untuk lebih memperketat supervisi. Stabilitas perbankan juga perlu terus dijaga karena pengalaman di tahun 2008 menunjukkan masalah likuiditas perbankan tidak merata di mana bank-bank kecil akan lebih rentan terhadap guncangan ini.

Pada Tanggal 30 September 2011 Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/21/PBI/2011. Peraturan ini berisi tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank. Kegiatan Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disebut Kegiatan LLD adalah kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk. Bank wajib menyampaikan Laporan LLD kepada

Bank Indonesia dengan benar dan tepat waktu. Selain itu Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/22/PBI/2011, Tanggal 30 September 2011. Peraturan ini berisi tentang Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Hutang Luar Negeri. Penerapan kebijakan ini dilakukan agar penarikan devisa hutang luar negeri dapat berjalan secara optimal, sehingga dapat mendukung tersedianya pasokan valuta asing yang berkesinambungan di pasar domestik dan terjaganya kestabilan nilai Rupiah.

2. Perlunya Memperkuat *Early Warning Systems* (EWS) untuk Krisis

Salah satu bentuk *Early Warning System* adalah *Exchange Market Pressure Index* (EMPI). EMPI merupakan EWS untuk nilai tukar (Gambar 2). Nilai tukar adalah salah satu variabel yang dapat menggambarkan kemungkinan terjadinya krisis.



Gambar 2. *Exchange Market Pressure Index* (EMPI) Indonesia Februari Tahun 2000-Februari 2011.

Sumber: Pengolahan Indeks oleh Penulis, Juli 2011.

Berdasarkan perhitungan EMPI tersebut tampak bahwa periode yang diprediksikan mengalami krisis nilai tukar adalah periode di mana EMPI berada di atas garis *threshold* yaitu garis putus-putus. Di mana garis *threshold* menggambarkan rata-rata indeks + 1.5 standar deviasi. Periode tersebut adalah pada tahun 2000, tahun 2001, tahun 2005, dan tahun 2008-2009. Nampak bahwa EMPI relatif cukup baik dalam memprediksikan

krisis. Pada tahun 2008 ketika Dolar menguat tampak bahwa EMPI mengalami kenaikan (penguatan Dolar dipicu oleh penjualan aset-aset Amerika).

3. Perlunya Memperkuat Protokol Manajemen Krisis

Memperkuat jaring pengaman krisis keuangan baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Jaring pengaman krisis di tingkat nasional adalah dalam bentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Koordinasi antara otoritas terkait perbankan, lembaga non-bank, lembaga penjamin simpanan menjadi sangat penting.

Financial safety net merupakan seluruh jaminan baik eksplisit maupun implisit di mana pasar percaya bahwa terdapat jaminan terhadap *financial liabilities*. Sehingga untuk menciptakan *financial stability* diperlukan *financial safety net*. Atau dengan kata lain bahwa *financial safety net* merupakan seluruh regulasi dan institusi finansial yang berupaya untuk mencegah atau membatasi kerugian penyimpan dana dalam hal terjadi kegagalan bank. Dengan definisi ini, *financial safety net* termasuk jaminan simpanan yang eksplisit maupun implisit, praktik resolusi terhadap bank yang mengalami insolvensi, kebijakan regulator, dan fungsi dari bank sentral sebagai *lender of the last resort*.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan untuk *sharing* risiko antara satu pihak dengan pihak lain yang diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dalam melakukan kegiatan usaha. Meskipun harus diwaspadai timbulnya *moral hazard* terhadap *sharing* risiko tersebut yang terjadi pada pihak yang merasa bahwa risikonya telah dibagi dengan pihak lain yang cenderung akan mengambil atau melakukan aktivitas yang berisiko tinggi. Jika *coverage* terlalu luas maka *moral hazard* akan lebih tinggi.

Financial safety net bertujuan untuk membuat kerusakan dalam sistem finansial lebih kecil dan untuk membatasi biaya yang timbul bila terjadi kerusakan tersebut. Secara umum *financial safety net* ditujukan untuk dunia perbankan di mana berdasarkan pengalaman selama dua dekade, terjadi serangkaian krisis perbankan yang terjadi di dunia di mana perbankan secara sistematis menjadi insolven. Insolven yang terjadi pada bank sistemik tersebut melibatkan biaya yang sangat besar terhadap bank itu sendiri, *customer* mereka maupun Pemerintah. Kegagalan bank memicu destruksi pada informasi kapital dan pada hubungan bank-*customer*. Kekacauan pada pembiayaan bank dan sistem pembayaran juga dapat

mengakibatkan reduksi pada investasi dan juga aktivitas ekonomi lain. Lebih jauh, penyimpanan dana di bank potensial untuk kehilangan simpanannya karena kegagalan bank. Dan akhirnya Pemerintah harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk mengatasi krisis perbankan tersebut. Untuk itulah *financial safety net* ditujukan yaitu untuk menjaga kondisi *financial stability*

Untuk mendesain *financial safety net* yang handal bukanlah hal yang mudah dan tentu saja memerlukan biaya (*cost*). Beberapa hal yang disyaratkan ada dalam desain *financial safety net* meliputi berapa *coverage* yang dijamin, waktu yang harus kredibel, dan penetapan kebijakan yang sederhana dan mudah diimplementasikan. Selain itu, beberapa hal yang potensial untuk muncul terkait dengan adanya *financial safety net* adalah:

- a. *Coverage* jaminan simpanan menimbulkan *moral hazard*, terutama bila *coverage*-nya adalah tidak terbatas (*unlimited*). Padahal biasanya dalam situasi krisis, orang tidak terlalu peduli dengan *moral hazard* karena tugas yang harus segera diselesaikan adalah untuk mengembalikan kepercayaan, dan jaminan membantu dalam pengembalian kepercayaan. *Moral hazard* tersebut dapat juga dilakukan oleh pihak perbankan sebagai contoh dalam hal ini di mana *financial safety net* yang diperoleh justru disalurkan lagi menjadi pembiayaan yang pada akhirnya digunakan oleh bank sebagai jaminan yang menjadi lebih besar karena dana dari *financial safety net* tersebut. Namun demikian, untuk menjaga berjalannya *market discipline*, hal yang perlu untuk diperhatikan adalah menentukan kapan ekstra jaminan simpanan akan berakhir dan penentuan waktunya haruslah kredibel. Misalkan jumlah simpanan yang dijamin ketika periode krisis adalah maksimum Rp.2 miliar, setelah krisis berakhir maka nilai penjaminan ini harus diturunkan.
- b. Perbedaan level proteksi yang diberlakukan akan menimbulkan keuntungan kompetitif yang tidak fair bagi institusi yang tidak menikmati jaminan tersebut.
- c. Untuk membuat jaminan kredibel, merupakan hal yang penting untuk menentukan cara bagaimana jaminan itu akan diberikan. Karena terdapat kemungkinan bahwa kapasitas Pemerintah untuk menyediakan jaminan yang telah diumumkan atau diimplikasikan dalam pengumuman dapat dipertanyakan. Ke depan, kebijakan yang lebih tajam harus diberlakukan untuk '*exit strategies*', terutama jika jaminan diperluas menjadi tidak terbatas (*unlimited*). Hal ini akan menjadi sebuah

keyakinan atau persepsi yang timbul bahwa sekali perluasan jaminan dilakukan, jaminan Pemerintah akan selalu ada dalam situasi krisis.

- d. Koordinasi implementasi *financial safety net* antar negara diperlukan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan

Dalam *financial safety net* bahwa dari 4 elemen kunci yaitu:

- a. *Prudential regulation* dan *supervision*.
- b. *Lender of the last resort*.
- c. *Failure resolution*.
- d. *Deposit insurance*.

Financial safety net ditujukan untuk menurunkan risiko dari terjadinya krisis finansial yang berkepanjangan. Dengan adanya *financial safety net* yang sesuai keyakinan cenderung untuk lebih besar dan dampak dari terjadinya krisis finansial lebih kecil dibandingkan jika tanpa ada *financial safety net*.

Masing-masing elemen dalam *financial safety net* menghadapi *trade off*, dan di sisi lain setiap elemen didesain untuk menurunkan kerusakan dalam sistem finansial yang timbul dari bank yang gagal. Di sisi lain, elemen-elemen tersebut harus didesain untuk menurunkan risiko *moral hazard* yang biasanya muncul dalam waktu yang bersamaan dengan rentannya *financial safety net* yang diharapkan dapat diminimalisir.

Pada saat masing-masing elemen menghadapi *trade off* yang sama, mereka didesain untuk mencapai tujuan yang berbeda, meskipun tidak sepenuhnya konsisten, yang berimplikasi pada pembagian tanggung jawab institusional

Banyak institusi yang berbeda terlibat dalam pembentukan elemen *financial safety net*. Selain otoritas *prudential-regulator* dan *supervisor*-otoritas moneter dan fiskal berperan penting dan sering terdapat juga lembaga tertentu yang menyediakan jaminan simpanan di mana lembaga ini mempunyai tanggung jawab khusus pada situasi krisis, termasuk dalam hubungan dengan resolusi bank gagal. Otoritas moneter dalam hal ini, di mana yang juga terlibat dalam tanggung jawab prudensial, memainkan peran krusial dalam *financial safety net* karena perannya sebagai '*lender of the last resort*'. Sedangkan otoritas fiskal terlibat dalam *financial safety net* secara langung maupun tidak langsung karena perannya sebagai '*solvency*

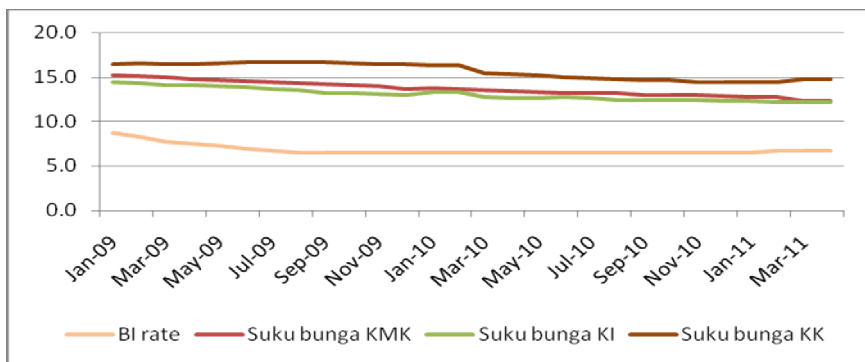
provider of last resort, dan juga tanggung jawab politik dalam penggunaan uang pembayar pajak.

4. Mendorong Korporasi Melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dan Menerbitkan Obligasi Korporasi

Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan *capital inflow* yang masuk untuk memanfaatkan dana lebih dan likuiditas berlebih. Perusahaan-perusahaan di Indonesia diharapkan dapat melakukan IPO ini agar *capital inflow* yang masuk dapat lebih optimal dalam menggerakkan sektor riil, sehingga *capital inflow* tidak hanya akan menggelembungkan sektor keuangan saja tapi juga akan memberikan dampak kenaikan produksi di sektor riil.

5. Otoritas Moneter dan Perbankan

Otoritas moneter dan perbankan perlu memanfaatkan peluang penurunan inflasi untuk terus berusaha menurunkan suku bunga, terutama suku bunga kredit agar dunia usaha kita menjadi kompetitif. Suku bunga kredit di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding negara tetangga. Walaupun BI *rate* sudah turun tampak bahwa suku bunga kredit kita sangat *rigid*. Suku bunga kredit baik untuk Kredit konsumsi (KK), Kredit Modal Kerja (KMK), dan Kredit Investasi (KI) masih di atas 12 persen. (Gambar 3). Angka ini jauh di bawah Negara Malaysia dan Thailand yang hanya sekitar 3-5 persen. Bagaimana industri kita bisa bersaing di tengah *high cost economy* di sektor riil ditambah dengan sektor perbankan yang kurang mendukung karena harus menanggung suku bunga kredit yang tinggi.



Gambar 3. Perkembangan Suku Bunga Kredit Periode Tahun 2009Q1-2011Q1

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia.

Bank Indonesia sendiri telah melakukan berbagai cara agar suku bunga kredit turun. Pada tahun 2010 Bank Indonesia telah membuat kesepakatan dengan 14 bank besar untuk menurunkan suku bunga. Di awal 2011 Bank Indonesia menerbitkan aturan suku bunga dasar kredit (SBDK) di mana perbankan diwajibkan mengumumkan secara transparan kepada nasabahnya berapa suku bunga dasar kredit bank tersebut sehingga konsumen akan lebih memiliki informasi dan dapat membandingkan efisiensi perbankan. Semakin rendah suku bunga dasar kredit menunjukkan bank tersebut semakin efisien. Bank Indonesia pun telah melakukan pendekatan persuasif melalui *moral suasion*, misalkan menghimbau bank-bank BUMN untuk mengawasi penurunan suku bunga kredit bank. Pada bulan November 2011 Bank Indonesia berencana akan mewajibkan BI *rate* masuk ke dalam Rencana Bisnis Bank terkait suku bunga kredit. BI *rate* harus dimasukkan ke dalam perhitungan suku bunga kredit. Hal ini agar penurunan BI *rate* disertai dengan penurunan suku bunga kredit.

Walaupun usaha BI telah cukup gencar untuk menurunkan suku bunga kredit, namun ada beberapa permasalahan yang masih menghambat bank untuk menurunkan suku bunga kredit walaupun BI *rate* telah turun. Beberapa permasalahan tersebut adalah klaim dari bank bahwa mereka menanggung *overhead cost* yang tinggi, kemudian inflasi yang tinggi dan tidak stabil, serta risiko di sektor riil yang besar. Bank Indonesia dan perbankan seharusnya dapat membahas berbagai permasalahan ini dan mencari solusi untuk permasalahan tersebut.

B. Desain Kebijakan Fiskal

1. Perbaikan Penyerapan Anggaran dan Mempersiapkan Dana Darurat

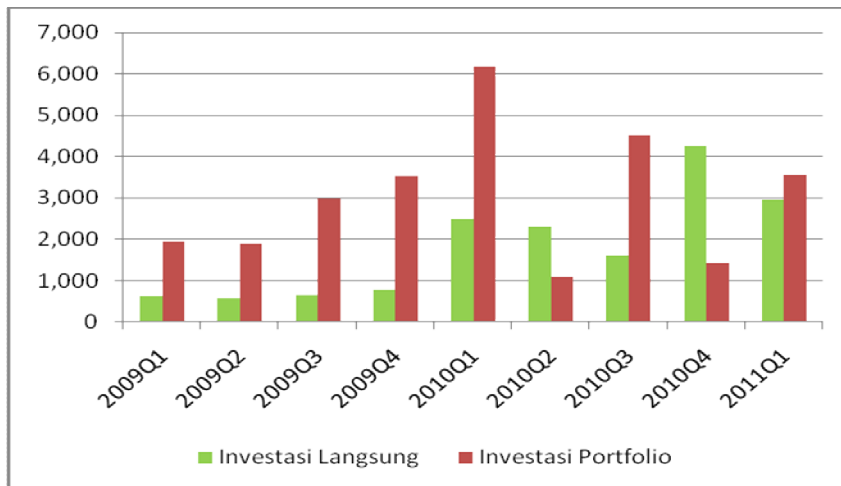
Stimulus fiskal disertai perbaikan *disbursement* Pemerintah untuk memperbaiki aktivitas di sektor riil. Selain itu diperlukan perbaikan pencairan belanja modal untuk mendorong perekonomian domestik, yaitu melalui percepatan dalam pencairan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selain itu dalam kebijakan fiskal terkait pembiayaan diperlukan skema pembelian kembali SBN (*buyback*), pembentukan dana stabilitas obligasi, pembiayaan impor untuk krisis komoditas pangan, serta memperkuat jaring pengaman.

Di dalam Undang-Undang APBN 2012 sudah dipersiapkan instrumen penanganan dan pencegahan krisis antara lain:²

1. Pasal 38, terkait fleksibilitas dalam hal tidak tercapainya target-target pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN.
2. Pasal 40, dampak krisis pada pembiayaan bersumber Surat Berharga Negara
3. Pasal 41, *contingency loan* untuk ketahanan pangan
4. Pasal 43, kondisi keadaan darurat, langkah penanggulangan krisis dan mekanisme persetujuan DPR 24 jam. Mekanisme ini perlu untuk memperpendek *inside lags* dalam kebijakan fiskal, agar kebijakan fiskal dapat merespon krisis dengan segera.

2. Insentif Kebijakan Fiskal untuk Menarik Investasi

Kebijakan fiskal juga terus perlu diperkuat untuk menarik investasi langsung. Arus modal masuk ke Indonesia masih didominasi oleh *hot money* dalam bentuk investasi portofolio (Gambar 4). Untuk itu perbaikan iklim investasi dan pemberian insentif fiskal menjadi penting untuk terus menarik investasi asing ke Indonesia.



Gambar 4. Investasi Langsung dan Investasi Portofolio Periode Tahun 2009Q1-2011Q1

Sumber: Diolah dari SEKI Bank Indonesia.

² Anggito Abimanyu, *Antisipasi Krisis Global dan Dampak pada Indonesia*, Seminar Pasar Modal kerjasama ISEI dan BEI, 9 November 2011.

Terkait fasilitas *tax holiday*, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan. Pembebasan pajak penghasilan badan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 Tahun Pajak dan paling singkat 5 Tahun Pajak. Wajib pajak yang dapat diberikan fasilitas pembebasan pajak atau pengurangan pajak penghasilan badan adalah wajib pajak baru yang memenuhi kriteria, yaitu:

- a. Merupakan industri pionir, seperti: industri logam dasar, industri pengilangan minyak bumi dan atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri permesinan, industri di bidang sumberdaya terbarukan, dan industri peralatan komunikasi.
- b. Mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang paling sedikit satu triliun rupiah.
- c. Menempatkan dana di perbankan Indonesia paling sedikit 10 persen dari total rencana penanaman modal dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal.
- d. Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia dengan pengesahannya ditetapkan paling lama 12 bulan sebelum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya PMK ini.

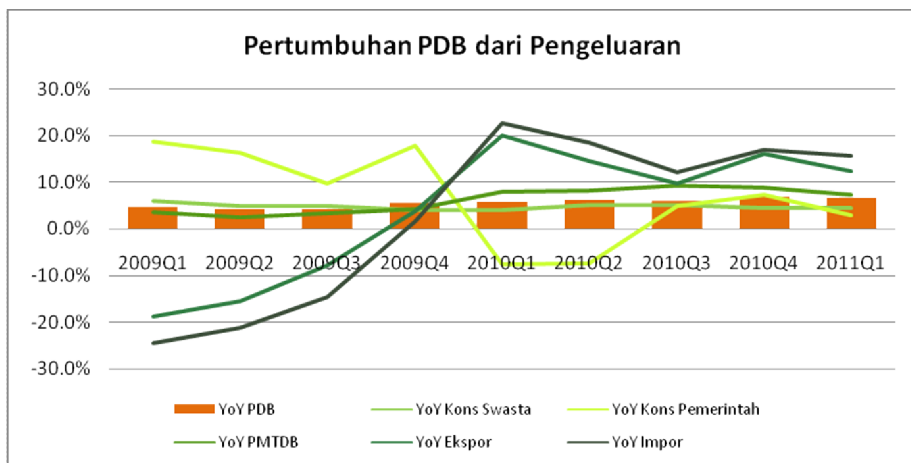
Untuk memperoleh fasilitas pembebasan pajak atau pengurangan pajak penghasilan badan, wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan.

C. Desain Kebijakan Sektoral

Dampak krisis global tidak merata terhadap sektor-sektor ekonomi di Indonesia. Secara teori, sektor yang relatif tidak terpengaruh dengan krisis global adalah sektor *non-tradables*, yaitu sektor yang relatif tidak bisa diperjualbelikan secara internasional seperti sektor perdagangan, pengangkutan, sektor jasa, sektor telekomunikasi, restoran dan hotel,

konstruksi, serta keuangan. Sektor ini tidak terlalu terpengaruh krisis global karena lebih mengandalkan pada pasar domestik. Sedangkan sektor yang *tradables* relatif akan lebih terpengaruh dengan krisis global karena sektor ini mengandalkan pada pasar ekspor, di mana ekspor saat ini terdampak negatif akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju. Contoh sektor *tradables* antara lain adalah sektor industri pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Dampak krisis terhadap ekspor tampak dari Gambar 5. Di Gambar 4 terlihat bahwa setelah kuartal 1 tahun 2010 pertumbuhan ekspor berada di bawah pertumbuhan impor sehingga terjadi ekspor bersih negatif.



Gambar 5. Pertumbuhan PDB dari Sisi Pengeluaran

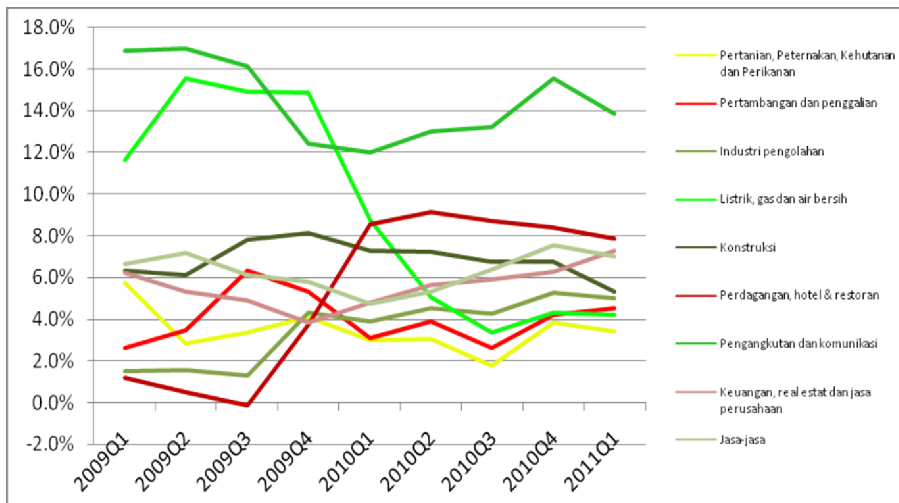
Sumber: BPS via CEIC.

Kinerja sektor *non-tradables* yang relatif terjaga saat krisis terlihat dari Gambar 5. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi, yaitu sebesar 14,4 persen selama periode kuartal 1 tahun 2009 sampai dengan kuartal 1 tahun 2011. Kemudian diikuti oleh pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 9,2 persen dalam periode yang sama. Meskipun sektor ini mengalami penurunan yang tajam dari kuartal 4 tahun 2009 ke kuartal 1 tahun 2010. Terlihat bahwa sektor-sektor yang tumbuh tinggi saat krisis adalah sektor yang *non-tradables* seperti pengangkutan dan komunikasi, perdagangan hotel dan restoran, sektor jasa, serta sektor keuangan. Sektor *tradables* relatif tumbuh lebih rendah walaupun masih tumbuh positif (sektor industri pengolahan,

pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalan).

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, perlu desain kebijakan sektoral yang melengkapi kebijakan moneter dan fiskal di level makro. Untuk sektor *tradables*, diperlukan kebijakan untuk menjaga daya saing dari sektor *tradables* ini. Di dalam *ranking* daya saing dunia menurut *World Economic Forum*, pada tahun 2011-2012 Indonesia menempati peringkat ke-46 dunia turun dari posisi 44 pada tahun 2010-2011. Penurunan ini terjadi karena ranking kita menurun jauh dalam masalah *public institutions*, birokrasi, dan infrastruktur.

Hal-hal ini yang menyebabkan *high cost economy* di Indonesia sehingga sektor-sektor *tradables* Indonesia menjadi kehilangan daya saing. Permasalahan daya saing ini sudah sering dikemukakan diberbagai penilaian *ranking* Indonesia lain seperti *Doing Business Worldbank*, *IMD Competitiveness Report*, dan lain-lain dan sudah sering diseminarkan dan menjadi bagian program kerja berbagai instansi Pemerintah Pusat. Namun hasilnya sampai saat ini belum terlalu menggembirakan.



Gambar 6. Pertumbuhan PDB Sektoral

Sumber: BPS via CEIC.

Salah satu terobosan yang telah dibuat adalah adanya *Masterplan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI)* untuk memperbaiki infrastruktur. Perbaikan infrastruktur dan konektivitas ini memang sangat

diperlukan untuk membantu sektor-sektor *tradables* untuk lebih berdaya saing di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Kompetisi global ini semakin ketat karena negara-negara besar seperti China dan India pun terpukul akibat pelemahan ekonomi Amerika Serikat dan Eropa sehingga mereka pun mencari pasar baru untuk ekspor mereka. Dan tidak menutup kemungkinan pasar baru itu juga adalah Indonesia. Artinya gempuran produk impor pun akan semakin besar. Hal ini akan menjadi pukulan bagi para produsen domestik jika mereka tidak juga meningkatkan daya saingnya. Karena MP3EI ini relatif baru, realisasi dan dampaknya harus masih kita tunggu. Tapi seandainya dapat dijalankan dengan baik tentu bisa membantu sektor-sektor yang rentan terhadap dampak krisis ini untuk meningkatkan daya saingnya.

Kebijakan pengembangan industri juga perlu terus didorong oleh Pemerintah. Pemerintah telah memiliki prioritas industri nasional dan ini bukan hanya tanggung jawab dari Kementerian Perindustrian tetapi tanggung jawab seluruh bangsa. Permasalahan klasik dari perekonomian Indonesia adalah nilai tambah perekonomian yang rendah. Para eksportir dan pengusaha cenderung lebih senang mengekspor barang mentah dibandingkan barang jadi, akibatnya komoditas primer menjadi andalan. Hal ini antara lain disebabkan masalah lemahnya daya saing kita terutama *high cost economy*. Sebagai akibatnya negara lain yang lebih banyak menikmati nilai tambah dari sumber daya alam kita. Produsen kita kalah bersaing dengan produsen China yang efisien dan bisa menghasilkan *mass production* pada tingkat harga yang rendah.

IV. SIMPULAN

Dalam menghadapi krisis global diperlukan untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik. Pentingnya memperkuat fundamental ekonomi domestik dapat diwujudkan oleh berbagai pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu terus melakukan reformasi birokrasi, perizinan, perpajakan, iklim investasi untuk memberikan ruang yang luas kepada dunia usaha agar dunia usaha kita dapat memiliki daya saing yang tinggi. Dampak tidak langsung dari pencarian pasar baru oleh negara-negara eksportir yang selama ini mengekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat juga semakin memperketat kompetisi. Pemerintah harus melindungi produsen domestik karena negara-negara lainpun

melakukan hal yang sama. Di saat krisis kecenderungan peningkatan proteksionisme memang terjadi. Namun, bukan “proteksionisme buta” yang diberikan tetapi “proteksionisme berkualitas” agar pengusaha kita bisa berdaya saing dan dapat memenuhi permintaan pasar domestik, serta siap menghadapi globalisasi ketika perekonomian dunia sudah pulih. Kebijakan sektoral pun untuk meningkatkan daya saing sektor-sektor ekonomi perlu terus diperkuat. Selain itu proteksi terhadap *illegal goods* dari luar negeri juga perlu terus diperkuat. Kebijakan ini dilakukan baik untuk melindungi produsen maupun konsumen domestik.

2. Otoritas moneter dan perbankan perlu memanfaatkan peluang penurunan inflasi untuk terus berusaha menurunkan suku bunga, terutama suku bunga kredit agar dunia usaha kita menjadi kompetitif. Stabilitas perbankan juga perlu terus dijaga karena pengalaman di tahun 2008 menunjukkan masalah likuiditas perbankan tidak merata di mana bank-bank kecil akan lebih rentan terhadap guncangan ini.
3. Otoritas fiskal perlu terus memperbaiki penyerapan anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran akan menghambat dampak multiplier ke sektor riil. Rencana sistem jaminan sosial nasional juga perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena akan berdampak pada *fiscal space* dan keberlangsungan fiskal. Belanja sosial yang tinggi di Amerika Serikat dan Eropa memberikan pelajaran yang berharga untuk kita. Selain penyerapan anggaran diperlukan pula dana darurat untuk mengantisipasi berbagai hal seperti ketahanan pangan, stimulus fiskal untuk sektor yang paling terpuak akibat krisis, serta guncangan harga komoditas.
4. Adanya krisis yang sering terjadi dan berulang-ulang mengingatkan kita pentingnya memiliki *crisis policy framework* yang kuat. Mitigasi krisis dan manajemen krisis perlu terus diperkuat. Di dalam jangka panjang, *sense of crisis* juga perlu disosialisasikan sejak dini.
5. Memperkuat *macroprudential* dan *microprudential*. *Macroprudential* terkait dengan regulasi dan supervisi perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan untuk menghindari instabilitas finansial dan untuk menghindari *systemic risk*. Sedangkan *microprudential* terkait dengan regulasi dan supervisi perbankan untuk menjaga kesehatan perbankan secara individual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. 2011. *Antisipasi Krisis Global dan Dampak pada Indonesia*, Seminar Pasar Modal kerjasama ISEI dan BEI, Jakarta.
- Adams, C. dan D. Park. 2009. *Global Imbalances: Perspectives from Developing Asia*, Asian Development Review.
- Blanchard, O. and G. M Milesi-Ferretti. 2009. *Global Imbalances, in Midstream?*. IMF Staff Position Note, SPN/09/29, International Monetary Fund, Washington DC.
- Busch, Klaus. 2010. *World Economic Crisis and the Welfare State*, International Policy Analysis.
- Capital Economics. 2011. *US deal won't avert a debt-rating downgrade in Capital Daily: Global economic and market analysis*, 2nd August 2011.
- . 2011. *Why do countries default and what are the consequences?*, in Capital Daily: Global Economics Focus, 7th July 2011.
- EC-Think Indonesia, *Quarterly Economic Update*, Jakarta: Januari 2011.
- EC-Think Indonesia, *Quarterly Economic Update*, Jakarta: Juli 2011.
- EC-Think Indonesia, *Quarterly Economic Update*, Jakarta: Oktober 2011.
- European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs, *Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses*, Juli 2009.
- IMF. 2011. *World Economic Outlook*, April 2011. International Monetary Fund. Washington DC.
- Kurniati, Y. dan M. I. Permata. 2009. *Transmisi Gejolak Eksternal ke Dalam Perekonomian Indonesia*. Working Paper Bank Indonesia, Jakarta.
- Reinhart, C. M. and K. S. Rogoff. 2008. *This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises*, NBER Working Paper: April 16, 2008.
- Worldbank. 2011. *Indonesian Economic Quarterly: Turbulent Times*. Jakarta.